

## Analisis KR Eks Gafatar

Dr Zuly Qodir



**SEBANYAK** 1.701 eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dikembalikan ke tanah asal mereka dari kamp ideologi Kalimantan Barat, ke Jawa Tengah, DIY dan provinsi lainnya. Dari DIY dan Jateng sementara ini mencapai 375 orang telah tiba di Asrama Haji Donohudan Surakarta. Terkait 'kembalinya orang hilang' ini, ada beberapa hal yang hemat saya harus diperhatikan serius. Sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali.

*Pertama*, eks Gafatar harus bersikap terbuka dengan warga masyarakat yang menerima. Tidak eksklusif dan menutup dialog serta kerja sama dengan masyarakat luas. Eks anggota Gafatar harus bersikap optimis bahwa masyarakat akan menerima kembali. Eks anggota Gafatar harus bersikap akomodatif dan komunikatif dengan warga masyarakat luas ketika tiba di daerah yang baru. Dengan sikap semacam itu maka eks anggota Gafatar akan diterima dengan terbuka oleh masyarakat. Namun jika eks Gafatar tertutup dan tidak dialogis, maka ada kemungkinan penolakan kembali warga masyarakat atas mereka. Hal seperti ini tentu tidak kita harapkan.

*Kedua*, masyarakat benar-benar bersedia menerima eks Gafatar tanpa diskriminasi dan mencurigai. Mereka adalah 'korban' dari paham yang sesat dan menyesatkan. Dengan sikap terbuka dan

\* Bersambung hal 7 kol 1

## Eks Gafatar

dialogis, masyarakat luas akan menjadikan eks Gafatar menjadi bagian dari mereka. Masyarakat akan menganggap eks Gafatar adalah korban dari ideologi keagamaan yang 'palsu', sesat serta menyesatkan. Mereka menjadi korban, tersesat dan disesatkan oleh sebab provokasi dari pimpinan dan aktivis Gafatar.

Di sinilah, masyarakat akan menerima eks anggota Gafatar ketika mereka menunjukkan adanya perilaku yang bersalah dan tidak akan kembali lagi pada paham yang telah diikutinya. Tetapi jika eks anggota Gafatar bersikeras dengan paham yang diyakini karena indoktrinasi yang 'gila', maka masyarakat akan menolak menerima mereka.

*Ketiga*, Pemerintah Daerah. Tugas berat Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan lahan, yang telah mereka 'hilangkan' dengan paksa untuk Gafatar. Karena ideologi 'sesat' dari pimpinan Gafatar sehingga eks anggota bersedia menjual seluruh asset kekayaan yang dimilikinya. Bahkan sebagian eks anggota Gafatar juga bersedia melepaskan atau mengundurkan diri dari pekerjaan yang

telah dimiliki, sebelum berangkat ke kamp ideologi di Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah tentu memiliki beban tambahan yang berat ketika harus menerima kembali eks anggota Gafatar yang telah kehilangan seluruhnya dari apa yang dimilikinya. Pemerintah Daerah juga menerima beban berat atas mereka yang kehilangan 'sebagian modal' yang mereka miliki selama mengikuti Gafatar.

Eks anggota Gafatar tetap butuh bertahan hidup dalam masyarakat dengan kondisi yang baru setelah keluar dari kerangkeng ideologis yang meresahkan masyarakat luas. Inilah beban yang harus dipikul Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Pusat perlu memperhatikan beban berat Pemerintah Daerah yang menanggung warga baru eks Gafatar.

*Keempat*, Kementerian Dalam Negeri melalui Kesbangpol harus bersedia melakukan gerakan 'pengembalian ideologi' kebangsaan dan keindonesiaan yang telah dibajak oleh Gafatar. Eks Gafatar telah dijejali ideologi antikeindonesiaan dan kebangsaan, sehingga bercita-cita membuat

kerangka sendiri tentang negara dan bangsa. Inilah yang harus dilakukan Kemendagri melalui Kesbangpol. *Kelima*, ormas keagamaan, mempersiapkan diri untuk mendidik mereka dengan paham yang normal. Gafatar telah 'membajak Islam' dengan paham yang sesat dan menyesatkan bahkan 'paham gila'. Karena itu perlu dikembalikan agar eks Gafatar normal kembali dalam beragama.

Tugas ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam terbesar harus benar-benar dapat merangkul eks Gafatar dalam gerakan dakwahnya. Tidak sekadar mengafirkan dan menyesatkan Gafatar tetapi membuatnya tertarik untuk kembali pada paham Islam yang normal, moderat, serta inklusif dengan keindonesiaan dan kebangsaan. Semoga bangsa ini tidak tercabik-cabik hancur dengan hadimya kelompok-kelompok kecil dari kalangan seiman dan seagama. Kita tundukkan ideologi pembajak agama dan keindonesiaan dengan paham keagamaan yang normal dan kebangsaan yang benar.

(Penulis adalah sosiolog Fisipol UMY)-f

Sambungan hal 1